

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Filipina merupakan salah satu negara yang darurat narkoba dewasa ini. Sebanyak lebih dari 35.000 kasus ditangani oleh polisi Filipina adalah mengenai kasus penggunaan dan pengedaran narkoba yang bernilai lebih dari 5 milyar peso.¹ Besarnya persentase tersebut juga diiringi dengan peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Filipina itu sendiri. Dalam kurun waktu 5 tahun, tepatnya dari tahun 2010 hingga tahun 2015, Filipina mengalami peningkatan kriminalitas terutama di bidang narkoba.² Di samping itu, kejahatan kriminal yang ditemukan oleh pemerintah Filipina juga berupa kasus kekerasan, pemerasan, pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, dan lain-lain. Dari kasus-kasus tersebut, 50% di antaranya memiliki keterkaitan dengan aktivitas perdagangan narkoba, yang mana pelaku yang terlibat dalam aksi-aksi kriminal tersebut teridentifikasi sebagai oknum pengguna atau pengedar narkoba.³

Peredaran narkoba mengalami peningkatan setiap tahunnya dan menjadi perhatian utama bagi pemerintahan nasional Filipina.⁴ Pengedaran benda terlarang tersebut dapat melalui berbagai cara, baik diedarkan melalui produk pangan maupun benda-benda lainnya seperti pakaian dalam, minuman kaleng, dan lain-lain. Jalur pendistribusiannya pun beragam, mulai dari jalur darat, laut, maupun

¹ Ricardo C. Marquez, "Philippine National Police 2015 Annual Report", PNP (2015): 34-35

² Office of The President of Philippines, "Nationwide Survey on the Nature and Extent of Drug Abuse in the Philippines", REECS (Juni, 2017): 34.

³ Ricardo C. Marquez, "Philippine National Police 2015 Annual Report", PNP (2015): 42-43

⁴ National Government Center, "National Anti-Drug Plan of Action", DDR (2015): 8.

udara.⁵ Kasus tersebut masih berlangsung hingga saat ini, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Duterte menyatakan perang terhadap narkoba di negaranya melalui kebijakan *War on Drugs*.⁶ Implementasi penghakiman dalam kebijakan negara ini terbilang terbilang tidak lazim, seperti penembakan di tempat tanpa proses peradilan.

Implementasi dari kebijakan *War on Drugs* ini mendapat kecaman dari berbagai pihak baik itu domestik dan internasional. Masyarakat Filipina sendiri menilai tindakan Duterte terlalu berlebihan.⁷ Masyarakat menilai, Duterte seharusnya melakukan proses peradilan terlebih dahulu terhadap tersangka yang terlibat kasus narkoba. Tindakan eksekusi mati di tempat yang dilakukan oleh pemerintah menimbulkan ketakutan di masyarakat sendiri, sehingga pelaksanaan kebijakan *War on Drugs* ini dinilai terlalu masif. Di samping itu, pihak internasional menganggap bahwa hal ini telah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama hak untuk hidup dan diadili.⁸ Sistem internasional menganggap bahwa meskipun oknum tersebut merupakan tersangka narkoba, namun eksekusi mati tetap tidak dibenarkan sebagai bentuk hukuman terhadap mereka dikarenakan hak asasi yang melekat pada individu tersebut, apalagi tanpa melalui proses peradilan. Oleh karena itu, Duterte menerima pemberontakan dari dalam negeri dan kecaman dari luar negeri.

⁵ PDEA, "The Philippine Drug Situation", PDEA (2013): 14.

⁶ Randolph Nerona, "War on Crime and Drugs: Understanding Support for the Antri-Crime and Anti- Drugs Campaign", *Philippine Journal of Psychology* 2, no. 50 (2017): 39-40.

⁷ Danilo Andres Reyes, "The Spectacle of Violence in Duterte's "War on Drugs"", *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 35, no. 3 (Oktober, 2016): 113-115.

⁸ Amnesty International, "If You Are Poor, You Are Killed: Extrajudicial Executions in The Philippines' "War on Drugs"", Amnesty International (Januari, 2017): 14.

Kecaman luar negeri bahkan juga dilakukan oleh negara sekutu yang telah menjalin kerjasama selama bertahun-tahun dengan Filipina, yaitu Amerika Serikat.⁹ Dalam sejarahnya, Amerika Serikat merupakan sekutu terdekat Filipina. Kedua negara ini telah banyak membangun kerjasama baik di bidang militer, ekonomi, dan lain-lain. Amerika Serikat adalah donor terbesar Filipina yang telah menyumbang sebanyak \$180 juta untuk membantu keuangan Filipina yang sebagian besarnya digunakan untuk Dinas Keamanan Filipina dalam hal penyediaan senjata dan pelatihan bagi para polisi di Filipina.¹⁰ Namun terkait dengan kebijakan “War on Drugs”, Amerika Serikat menarik diri dan menghentikan segala bentuk bantuan persenjataannya kepada Filipina. Tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu diambil karena Amerika Serikat menganggap bahwa implementasi kebijakan *War on Drugs* telah banyak melanggar nilai-nilai HAM.¹¹ Di samping itu, kedudukan Amerika Serikat yang merupakan negara taat HAM, membuatnya semakin sulit untuk membantu Filipina yang dinilai telah banyak melakukan aksi pelanggaran HAM.

Pada sisi lain, Rusia malah menunjukkan sikap yang berbeda. Rusia menyatakan bahwa negaranya siap membantu Filipina dalam kebijakan *War on Drugs*.¹² Titik awal dimulainya hubungan Filipina dengan Rusia dilihat dari inisiasi kedekatan kedua negara tersebut melalui kunjungan dan pertemuan yang dihadiri oleh Duterte dan Putin. Sejauh ini Putin dan Duterte telah melakukan

⁹ Dahlia Simangan, “Is the Philippine “War on Drugs” an Act of Genocide?”, *Journal of Genocide Research* 20, No. 1 (Oktober, 2017): 2

¹⁰ Human Rights Watch, “License to Kill: Philippine Police Killings in Duterte’s “War on Drugs””, HRW (Juni, 2016): 97.

¹¹ Matthew Wells, “The Human Rights Consequences of the War on Drugs in the Philippines”, *Amnesty International* (Juli 2017): 5-6.

¹² Pia Ranada, “Rusia Ready To Help In Duterte’s Drug War”, *Rapples*, <https://www.rappler.com/nation/170962-russia-help-duterte-drug-war-philippines>, (diakses pada 24 September 2017)

sebanyak 3 kali pertemuan.¹³ Pertemuan pertama diadakan di Lima, Peru, pada acara *APEC Summit* tahun 2016. Pada pertemuan ini Duterte menyampaikan bentuk kekecewaanya terhadap komunitas internasional dan juga Amerika yang menganggap tindakannya sebagai bentuk pelanggaran HAM. Pada pertemuan ini juga Duterte menyampaikan keinginannya untuk meminta bantuan kepada Rusia dalam bidang persenjataan di negaranya. Pertemuan yang kedua antara Rusia-Filipina dilakukan setelah kegiatan *Belt and Road Forum* di Beijing. Dalam kesempatan ini, Duterte mendeklarasikan posisinya yang saat sekarang tidak lagi bersekutu dengan Amerika Serikat seperti dulu.¹⁴ Ia juga menjelaskan kecenderungan yang lebih ingin untuk menjalin hubungan luar negeri dengan Rusia dan juga Beijing ketimbang dengan Negara Amerika Serikat.

Pertemuan ketiga diadakan melalui kunjungan langsung oleh Duterte ke Moskow pada tahun 2017. Pada pertemuan tersebut, melahirkan pertumbuhan kerjasama dalam perdagangan bilateral dan menginisiasi untuk semakin meningkatkan upaya untuk melakukan investasi di kedua negara tersebut. Pada saat itu Duterte didampingi oleh delegasinya yang merupakan para pengusaha Filipina sebanyak 200 orang, menyepakati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara sinergis, dimana pada saat itu mendapatkan kesepakatan perdagangan sebanyak \$875 juta.¹⁵ Sementara itu dalam bidang pertahanan, kedua negara ini telah menandatangani persetujuan untuk meningkatkan jumlah pertukaran personil dan pelabuhan, mengirim para pengamat untuk masing-

¹³ Ian Storey, "Duterte's Moscow Visit Advances Philippine and Russian Foreign Policy Goals", ISEAS Yusof Ishak Institute, no. 40 (Juni, 2017): 3.

¹⁴ Jyotishman Bhagawati, "Duterte's Foreign Policy Shift: Bandwagoing with China", National Maritime Foundation (Oktober, 2017): 1

¹⁵ Ian Storey, "Duterte's Moscow Visit Advances Philippine and Russian Foreign Policy Goals", ISEAS Yusof Ishak Institute, no. 40 (Juni, 2017): 5.

masing pelatihan militer di masing-masing negara untuk meningkatkan pendidikan militer. Kesepakatan ini dibuat untuk meningkatkan aktivitas dan kapasitas agar memiliki kualitas yang lebih baik.

Dikaitkan dengan implementasi *War on Drugs* yang membutuhkan persenjataan yang mumpuni, Duterte membenarkan bahwa saat ini Filipina belum mampu secara independen menyediakan persenjataan. Oleh karena itu, ia mengakui bahwa Filipina sangat mengharapkan perlindungan serta bantuan dari Rusia berupa persenjataan atau pinjaman lunak dalam bidang persenjataan demi keamanan Filipina.¹⁶ Permintaan ini dikabulkan oleh Putin selaku Presiden Rusia dengan memberikan bantuan berupa: latihan militer, senjata senapan, tank, dan lain-lain.¹⁷

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kerjasama-kerjasama yang dilakukan oleh Rusia terhadap negara lain khususnya di kawasan Asia Tenggara. Rusia memang telah memulai kerjasama dengan ASEAN dari tahun 1991, hanya saja kerjasama ini tidak bergerak dalam bidang pemasokan senjata atau militer lainnya. Kebanyakan dari kerjasama yang sudah terjalin hanya bergerak di bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya.¹⁸ Misalnya bantuan atau hubungan luar negeri yang terjalin antara Rusia-Indonesia sejak tahun 2005. Pada hubungan Rusia-Indonesia ini, Rusia hanya bekerja sama dan memberi bantuan dalam bentuk dana untuk keperluan teknis terhadap proyek kerjasama luar negeri

¹⁶ Pia Ranada, "Rusia Ready To Help In Duterte's Drug War", Rapples, <https://www.rappler.com/nation/170962-russia-help-duterte-drug-war-philippines>, (diakses pada 24 September 2017).

¹⁷ Ian Storey, "Duterte's Moscow Visit Advances Philippine and Russian Foreign Policy Goals", ISEAS Yusof Ishak Institute, no. 40 (Juni, 2017): 4-5.

¹⁸ ASEAN, "Overview ASEAN-Russia Dialogue Partnership", ASEAN (Januari, 2016): 1-6.

kedua negara tersebut.¹⁹ Seperti contoh yang telah diberikan, dapat disimpulkan bahwa ada perlakuan yang berbeda dari Rusia terhadap Filipina terkait kebijakan *War on Drugs* tersebut, dimana bantuan yang diberikan oleh Rusia terbilang berbeda dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Rusia kepada negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Bahkan terkait kebijakan *War on Drugs* ini, Rusia akan menyanggupi untuk memberikan bantuan persenjataan dalam jumlah berapapun sesuai dengan keinginan dari Filipina.²⁰

Meskipun menuai banyak kejanggalan dan kecaman dari berbagai pihak, hal ini tidak menghentikan Rusia untuk tetap memberikan bantuan kepada Filipina. Bahkan status Rusia yang masih menjabat sebagai dewan HAM di PBB pun tidak menjadikannya antipati terhadap implementasi kebijakan *War on Drugs* di Filipina. Walaupun pada akhirnya tindakan yang dilakukan oleh Rusia tersebut membuatnya dianggap tidak mampu mengangkat nilai-nilai HAM dan didesak untuk meninggalkan posisinya sebagai dewan HAM PBB.²¹

Kerjasama yang dimiliki oleh suatu negara dengan negara lain bertujuan untuk menciptakan *mutual benefit* baik itu dari segi ekonomi, politik, dan lain-lain bagi kedua negara tersebut.²² Kerjasama yang terjadi antara kedua negara terkait isu *War on Drugs* ini diindikasikan akan menjadi sebuah bentuk hubungan luar negeri jangka panjang yang membuat hambatan perdagangan serta tendensitas

¹⁹ KEMLU, "Sinopsis Hubungan Kemitraan ASEAN-RUSIA", KEMLU (Januari, 2016), <https://www.kemlu.go.id/ptri-asean/en/Pages/Rusia.aspx> (diakses pada 1 Oktober 2018).

²⁰ Pia Ranada, "Rusia Ready To Help In Duterte's Drug War", Rapples, <https://www.rappler.com/nation/170962-russia-help-duterte-drug-war-philippines>, (diakses pada 24 September 2017)

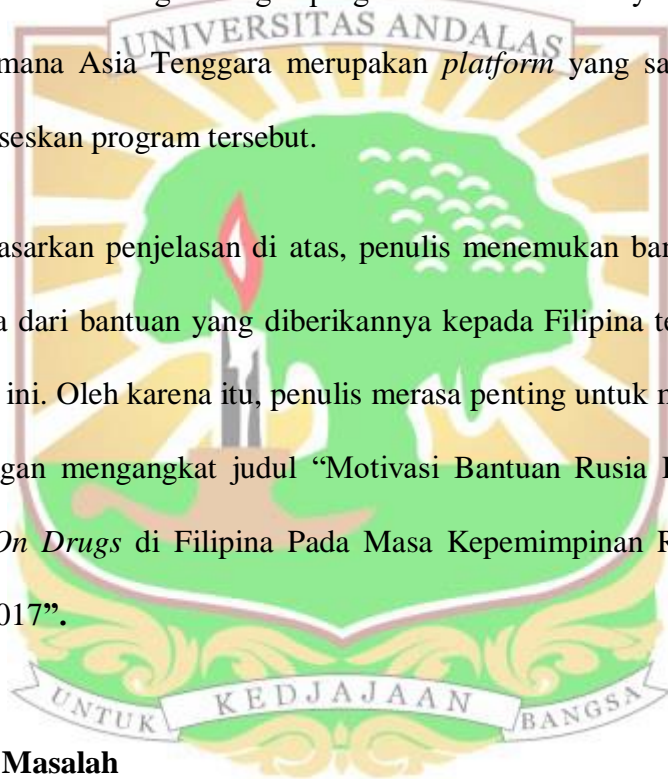
²¹ Natasia Christy Wahyuni, "Rusia Didesak Keluar dari Dewan HAM PBB". Berita Satu (Oktober, 2016), <http://www.beritasatu.com/dunia/394824-rusia-didesak-keluar-dari-dewan-ham-pbb.html> (diakses pada 2 Oktober 2018)

²² Kenneth A. Oye, "Explaining Cooperation under Anarchy: Hypotheses and Strategies", Cambridge University Press 38, No. 1 (Oktober, 1985): 4

untuk bekerja sama antara Filipina dengan Rusia akan semakin terbuka lebar dan erat.

Penulis menilai, Rusia memiliki intensi tersendiri dalam keputusannya untuk membantu Filipina. Dengan fakta bahwa Filipina yang merupakan salah satu negara anggota ASEAN, seolah berkaitan dengan arah kebijakan luar negeri Rusia yang pada tahun 2015 lalu mulai difokuskan kepada kawasan Asia Tenggara.²³ Hal ini beriringan dengan program “Pivot to Asia” yang direncanakan oleh Rusia dimana Asia Tenggara merupakan *platform* yang sangat berpotensi untuk menyukseskan program tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menemukan banyak alasan dan motivasi Rusia dari bantuan yang diberikannya kepada Filipina terkait kebijakan *War on Drugs* ini. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk membuat sebuah penelitian dengan mengangkat judul “Motivasi Bantuan Rusia Kepada Filipina Terkait *War On Drugs* di Filipina Pada Masa Kepemimpinan Rodrigo Duterte Tahun 2016-2017”.



1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan *War on Drugs* adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Filipina pada masa kepemimpinan Rodrigo Duterte. Implementasi dari kebijakan ini menuai banyak kecamauan dan pertentangan dari berbagai pihak baik nasional maupun internasional. Hal ini dikarenakan kebijakan *War on Drugs* dianggap telah banyak melanggar hak asasi manusia seperti hukuman mati di

²³ Sergey Strokan dkk, “Moskow Ubah Fokus ke Asia Tenggara”, *Russia Beyond*, https://id.rbth.com/politics/2015/11/30/moskow-ubah-fokus-ke-asia-tenggara_545811 (diakses pada 24 September 2018)

tempat tanpa melalui proses peradilan. Amerika Serikat sebagai sekutu yang telah bertahun-tahun bekerja sama dengan Filipina pun ikut menarik diri. Di sisi lain, Rusia membantu Filipina dengan memberikan bantuan terutama di bidang persenjataan terkait implementasi kebijakan *War on Drugs*. Bantuan yang diberikan oleh Rusia merupakan tindakan yang tidak lazim. Hal ini dikarenakan posisinya yang menjadi dewan HAM PBB menjadi terancam karena desakan dari berbagai pihak yang menganggap negara ini ikut terlibat dalam aksi pelanggaran HAM di Filipina. Di samping itu, bantuan yang terbilang ekstrem dari Rusia yaitu berupa persenjataan tanpa batas dan bantuan di bidang militer lainnya, dinilai sangat berbeda dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh Rusia kepada negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara sebelumnya. Fenomena ini yang dianalisis oleh penulis yaitu mengenai motivasi Rusia yang lebih dalam terhadap pemberian bantuan persenjataan kepada Filipina terkait kebijakan *War on Drugs*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

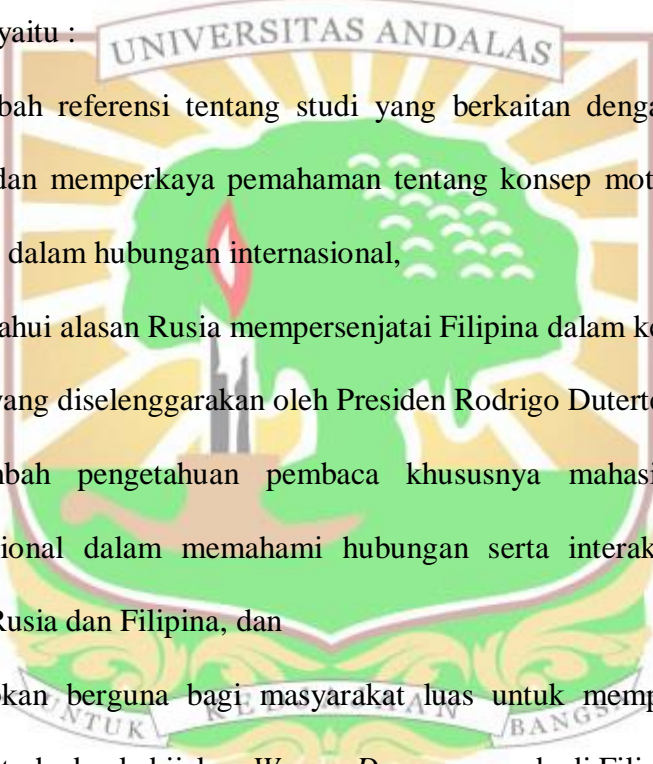
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Mengapa Rusia membantu Filipina Terkait Kebijakan *War On Drugs* Pada Masa Kepemimpinan Rodrigo Duterte Tahun 2016-2017?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah menjelaskan dan mendeskripsikan motivasi Rusia dalam menargetkan dan memberikan bantuan senjata kepada Filipina terkait kebijakan *War on Drugs*.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan menimbulkan manfaat bagi para pembaca, yaitu :

- 
- a. Menambah referensi tentang studi yang berkaitan dengan bantuan luar negeri dan memperkaya pemahaman tentang konsep motivasi pemberian bantuan dalam hubungan internasional,
 - b. Mengetahui alasan Rusia mempersenjatai Filipina dalam kebijakan *War on Drugs* yang diselenggarakan oleh Presiden Rodrigo Duterte,
 - c. Menambah pengetahuan pembaca khususnya mahasiswa hubungan internasional dalam memahami hubungan serta interaksi yang terjadi antara Rusia dan Filipina, dan
 - d. Diharapkan berguna bagi masyarakat luas untuk memperdalam kajian mereka terhadap kebijakan *War on Drugs* yang ada di Filipina.

1.6 Kajian Pustaka

Dalam menganalisis judul yang diangkat, peneliti mencoba merujuk kepada beberapa kajian pustaka yang dianggap relevan pada penelitian kali ini. Artikel pertama menjelaskan tentang bantuan luar negeri yang menjadi suatu

bentuk implikasi dari sebuah diplomasi kemanusiaan.²⁴ Pada jurnal ini, penulis mengatakan bahwa sebuah bantuan luar negeri dilakukan sebagai bentuk panggilan kemanusiaan ataupun sebagai upaya untuk melaksanakan diplomasi kemanusiaan terhadap negara penerima. Sementara dalam penelitian penulis kali ini ditemukan bahwa Rusia membantu Filipina yang dianggap telah melanggar HAM dan bertentangan dengan asas kemanusiaan.

Kajian pustaka selanjutnya yang peneliti gunakan yaitu sebuah jurnal yang menjabarkan tentang bagaimana aksi dan implementasi dari kampanye anti-narkoba yang dilakukan oleh Duterte di Filipina. Serta menjelaskan bagaimana dinamika dari kebijakan “War on Drugs” yang membuat Filipina dianggap sebagai negara yang melakukan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak kekerasan yang merajalela.²⁵

Kajian pustaka ketiga menjelaskan mengenai isu kepentingan nasional yang membentuk hubungan eksternal suatu negara dengan contoh kasus kebijakan luar negeri Nigeria dari tahun 1960-2007. Dalam tulisan ini, kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan nasional yang digunakan untuk menjelaskan motif di balik hubungan Nigeria dengan berbagai negara yang ada di dunia. Pada kesimpulannya, Ibijola dan Opeyemi menjelaskan bahwa Nigeria ingin melakukan hubungan dengan negara lain dan terlibat dalam misi untuk mendukung perdamaian untuk meningkatkan citra di kalangan internasional dan

²⁴ Anita Afriani Sinulingga, “Isu Bencana dan Prinsip-Prinsip Humanitarian Dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional”, *Andalas Journal of International Studies* 5, No. 1 (Mei, 2016): 21.

²⁵ Danilo Andres Reyes, “The Spectacle of Violence in Duterte’s “War on Drugs””, *Journal of Current Southeast Asian Affairs* 35, no. 3 (Oktober, 2016): 116-120.

mendapat julukan sebagai raksasa Afrika untuk mendapatkan respon diplomatik yang positif.²⁶

Kajian pustaka berikutnya membahas tentang Motif Kerjasama antara KRG (Kurdish Regional Government) Irak dengan Pemerintahan Turki (2013-2016). Pada artikel ini penulis dalam artikel tersebut menggunakan perspektif neorealisme untuk menganalisis motif dibalik terjalinnya hubungan antara dua entitas tersebut. Dari tulisannya diketahui bahwa ada dua pokok utama yang menjadi motif dalam kerjasama tersebut yaitu kepentingan nasional (*self interest*) dan keuntungan bersama (*mutual benefit*).²⁷ Dari sisi *mutual benefit* kedua negara ini sama-sama menginginkan peningkatan ekonomi bagi kedua negaranya. Sedangkan dari segi *self interest*, KRG memiliki kepentingan untuk mendapatkan pengakuan akan kemerdekaannya serta ekonomi yang bebas serta mandiri dari pengaruh Iran. Sementara *self interest* dari negara Turki adalah memberikan pengaruh Turki ke dalam permasalahan internal yang terjadi di wilayah Kurdish serta menciptakan *balancing of power* terhadap Iran.

Kajian pustaka yang terakhir menjelaskan bahwa bantuan luar negeri biasanya diberikan oleh negara-negara Barat, Amerika Utara, dan Jepang yang tergabung dalam *Development Assistance Committee* (DAC) yang merupakan negara-negara anggota dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Tujuan utama pemberian bantuan luar negeri adalah untuk

²⁶ Ade-Ibijola dan Aderemi Opeyemi, "Overview of National Interest, Continuities and Flaws in Nigeria Foreign Policy", *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 3, no. 1 (January, 2013): 5-7.

²⁷ Maryam Jamilah, "Motif Kerjasama antara KRG (Kurdish Regional Government) Irak dengan Pemerintahan Turki (2013-2016)", *Andalas Journal of International Studies* 7, no. 32 (May, 2018): 44.

bantuan kemanusiaan, pembangunan, diplomasi dan perdagangan. Namun saat abad ke-21 ini, bantuan luar negeri telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga tujuan negara dalam memberi bantuan luar negeri itu semakin beragam.²⁸

Dari kelima tinjauan pustaka di atas, penelitian sebelumnya hanya sebatas membahas tentang bentuk dan proses dari bantuan luar negeri dalam bidang persenjataan yang dilakukan oleh Rusia kepada Filipina dalam kebijakan *War on Drugs*-nya. Pada penelitian kali ini, penulis berusaha untuk menjelaskan secara lebih komprehensif tentang hal yang melatarbelakangi atau menjadi motivasi bagi Rusia dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Filipina

1.7 Kerangka Konseptual dan Teori

1.7.2 Bantuan Luar Negeri

Pada penulisan kali ini, penulis menggunakan konsep bantuan luar negeri dan motivasi bantuan luar negeri dalam menganalisis alasan Rusia membantu persenjataan Filipina dalam kebijakan *War on Drugs*. Seorang ahli Ilmu Hubungan Internasional bernama Robert Gilpin, menuliskan penjelasan mengenai konsep bantuan luar negeri dalam bukunya. Ia mengatakan bahwa bantuan luar negeri tersebut diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh negara yang relatif kaya kepada negara berkembang atau miskin.²⁹ Sedangkan secara umum, bantuan luar negeri dapat dikategorikan sebagai salah satu instrument yang dapat digunakan oleh sebuah negara dalam mencapai tujuan dan

²⁸ Carol Lancaster, "Foreign Aid in The Twenty First Century: What Purpose?" (New York: M.E Shape, 2008), 40-43.

²⁹ Robert Gilpin, "The Political Economy of International Relations", (New Jersey: Princeton University Press, 1987), 311.

kepentingan nasionalnya. Bantuan luar negeri diartikan sebagai transfer sumber daya baik itu bantuan dalam bentuk barang dan jasa, ataupun dana, dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan secara menyeluruh.

Dalam pelaksanaannya, ada 2 cara yang dilakukan oleh para pemberi bantuan luar negeri. *Pertama*, negara pemberi bantuan dapat melakukannya dengan memberikan bantuan luar negeri secara bilateral, atau secara langsung antara negara pendonor dengan resipien tanpa perantara pihak lain. *Kedua*, apabila negara pendonor ingin memberikan bantuan secara multilateral, yaitu dalam jumlah negara resipien yang cukup banyak, negara pemberi bantuan dapat melakukannya melalui organisasi-organisasi internasional seperti IMF, PBB, *World Bank*, dan lain sebagainya. Mekanisme cara yang kedua ini adalah bahwa negara pendonor akan memberikan bantuannya kepada institusi yang bertanggung jawab, barulah kemudian institusi-institusi tersebut mengirimkan bantuannya kepada negara-negara yang membutuhkan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bantuan luar negeri ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan dan ekonomi. Menurut Steven Radelet, tujuan dari pembangunan dan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemberian dukungan terhadap sektor-sektor produktif seperti agrikultur, pengembangan ide dan teknologi,

³⁰ Steven Radelet, "A Primer on Foreign Aid", Working Paper of Center for Global Development (Juli, 2006): 7.

2. Untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau sistem politik,
3. Untuk mendukung pemberian bantuan berupa makanan atau komoditas lainnya ketika sedang dalam masa pemulihan atau ketika terjadi krisis humaniter, dan
4. Untuk membantu menstabilkan ekonomi setelah terjadinya guncangan ekonomi.

Terkait dengan bentuk bantuan luar negeri, seorang ahli bernama Andy Sumner menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “The Future of Foreign Aid”, ada 2 jenis bantuan luar negeri yang diberikan oleh sebuah negara kepada negara lain,³¹ yaitu:

1. Bantuan dalam bentuk dana (*financial aid*)

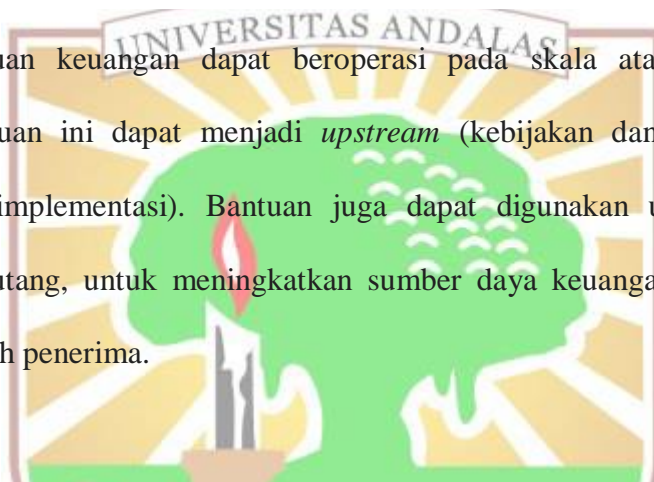
Financial aid dapat berupa bantuan *concessional* yang merupakan hibah atau pinjaman lunak bersubsidi, dan juga bantuan *non-concessional* yang merupakan pinjaman yang mempengaruhi pasar. Selanjutnya, bantuan dalam bentuk finansial ini kemudian dibagi lagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a.) Bantuan proyek (*project aid*), bantuan dalam bentuk proyek ini digunakan dengan menggunakan sistem pemerintahan. Artinya, uang yang diberikan oleh negara pendonor tersebut dimasukkan ke dalam anggaran pemerintah negara penerima untuk pelaksanaan sebuah proyek tertentu. Bantuan ini juga dapat dilakukan melalui lembaga seperti sektor privat, LSM, dan *NGOs*.

³¹ Andy Sumner dan Richard Mallet, “The Future of Foreign Aid”, (Palgrave Macmillan: Houndmills, 2013), 15-16.

- b.) Bantuan program (*program aid*), merupakan bantuan yang muncul setelah mulai berkurangnya bantuan proyek. Bantuan program ini lebih menekankan penggabungan dana untuk peningkatan beberapa sektor, dan juga mengobjektifkan untuk menciptakan adanya bentuk program atau kerjasama baru antara negara pemberi dan penerima untuk menjaga kestabilan hubungan luar negeri antara negara-negara yang terlibat

Bantuan keuangan dapat beroperasi pada skala atau tingkat yang berbeda. Bantuan ini dapat menjadi *upstream* (kebijakan dan lembaga) atau *downstream* (implementasi). Bantuan juga dapat digunakan untuk mendanai penghapusan utang, untuk meningkatkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi pemerintah penerima.



2. Bantuan bukan dalam bentuk dana (*non-financial aid*)

Bantuan non-finansial ini adalah bantuan yang diberikan oleh suatu negara dalam bentuk barang atau jasa. Bantuan ini dikategorikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a.) Bantuan teknis (*technical assistance*), merupakan transfer ilmu pengetahuan melalui bantuan tenaga ahli, peralatan, pelatihan, dan elemen-elemen teknis lainnya.
- b.) Bantuan makanan (*food aid*), bantuan berupa makanan dan kebutuhan pangan. Biasanya dilakukan pada saat terjadi bencana atau krisis di sebuah negara.

1.7.3 Motivasi Bantuan Luar Negeri

Selanjutnya kita berbicara mengenai konsep dari motivasi bantuan luar negeri. Motivasi dalam sebuah bantuan luar negeri adalah sebuah elemen yang sangat penting, karena hal ini menjadi pendorong bagi negara pendonor untuk memberikan bantuan luar negeri yang juga menunjukkan alasan di balik bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara ke negara lain.³² Bantuan luar negeri pasti memiliki latar belakang yang berbeda dan motivasi tersendiri. Hal inilah yang menjadi landasan tentang hal yang melatarbelakangi bentuk dan juga sasaran negara tujuan sebuah bantuan luar negeri tersebut dilakukan.

Seorang ahli bernama Fransisco Sagasti menjelaskan bahwa motivasi suatu negara dalam memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain dapat dilihat dari bentuk bantuan luar negerinya, dan juga manfaat yang didapatkan oleh negara pendonor dari implementasi pemberian bantuan luar negeri yang ia laksanakan.³³ Lebih lanjut ia juga menjelaskan bahwa ada 3 motivasi utama yang berperan dalam membentuk kebijakan bantuan luar negeri, yaitu:

- a.) Motivasi solidaritas internasional dan keagamaan (*international solidarity and religious motivations*)

Motivasi ini berlandaskan rasa tanggungjawab atau kewajiban moral si negara pendonor untuk memberikan bantuan kepada negara miskin. Motivasi ini menekankan kepada tanggungjawab moral yang dimiliki oleh negara pendonor untuk ikut membantu perkembangan negara penerima dengan asas etika, kemanusiaan, dan altruisme. Implementasi dari bantuan luar negeri yang memiliki

³² Louis A. Picard, "Foreign Aid and Foreign Policy: Lessons for the Next Half Country" (New York: M.E. Sharpe, 2008), 12.

³³ Fransisco Sagasti, "Official Development Assistance: Background Context, Issues, and Prospects", PBB (Oktober, 2005): 2-3.

motivasi solidaritas internasional dan keagamaan dapat kita lihat pada praktik bantuan yang diberikan oleh negara-negara muslim saat terjadi perang di Palestina, yang motivasi dari bantuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meringankan penderitaan manusia dan memperlihatkan solidaritasnya sebagai sesama umat manusia;
2. Membantu menanggulangi bencana alam atau bencana kemanusiaan melalui bantuan darurat dan bantuan kemanusiaan; dan
3. Membangun masyarakat lokal melalui penguatan keahlian, kemampuan, dan kompetensi sebagai inisiatif untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

b.) Motivasi kepentingan nasional (*narrow and enlightened self-interest motivations*)

Motivasi yang berkaitan dalam kepentingan nasional ini dapat dilihat ke dalam 3 hal, yaitu:

1. Kepentingan strategis dan keamanan, yang merespon terhadap isu geopolitik dan keamanan dengan pertimbangan negara pendonor.
 - a. Pada level nasional, menjustifikasi pemberian bantuan kepada negara-negara berkembang yang penting dalam segi geopolitik bagi negara pendonor, khususnya untuk ikut terlibat dalam *war on terrorism* dan *war on drugs*
 - b. Pada level regional, mempertimbangkan kepentingan terhadap aliansi atau perjanjian regional
2. Kepentingan politik, yang fokus kepada perolehan dukungan politik untuk kebijakan luar negeri dan dalam negeri.

- a. Dengan konstituen asing, melalui dukungan kepada bekas negara jajahan dan area lainnya yang memiliki ikatan sejarah khusus dengan negara pendonor. Dalam hal ini, bantuan luar negeri bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan politik internasional.
- b. Berpusat pada konstituen domestik, memperoleh dukungan dari para imigran dan grup etnis dari luar negeri yang berkedudukan di negara pendonor.

3. Kepentingan ekonomi dan perdagangan, yang menekankan kepada komersial langsung dan manfaat keuangan bagi negara pendonor. Manfaat yang dimaksud dapat berupa ekspansi ekspor, penerimaan tenaga kerja di negara penerima donor, dukungan dari produsen dalam negeri, keamanan berinvestasi di negara berkembang, menjamin akses terhadap sumber daya alam, akses untuk memperoleh tenaga kerja yang terqualifikasi, dan menciptakan permintaan untuk kegiatan ekspor.

c.) Motivasi menjaga ketersediaan barang publik internasional (*provision of international public good motivations*)

1. Munculnya permasalahan global (*emergence of regional and global problems*) dimana pada akhirnya bantuan luar negeri yang diberikan bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem internasional dari ancaman permasalahan global tersebut, seperti:
 - a. Menghadapi ancaman lingkungan global dan regional, seperti pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hilangnya

keanekaragaman hayati, penggundulan hutan tropis, dan lain-lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi negara-negara maju secara langsung.

- b. Mengatasi pertumbuhan penduduk global yang tidak seimbang dan ancaman kesehatan, seperti AIDS, HIV, epidemi, dan lain-lain, yang nantinya akan menyebar ke negara lain.
- c. Mendukung inisiatif kerjasama internasional untuk menghindari kejahatan publik baik pada level regional ataupun global, seperti kejahatan narkoba, lalu lintas, pencucian uang, dan terorisme.

2. Menjaga stabilitas sistem internasional (*maintaining stability of the international system*), yang bertujuan untuk memfasilitasi bantuan kepada negara dan kawasan tertentu untuk menjaga kestabilan internasional dan menjaga kepentingan negara pendonor untuk jangka panjang.

- a. Menjaga stabilitas politik dengan menghindari konflik domestik, seperti inisiatif menciptakan perdamaian (*peace-making*) dan menjaga perdamaian (*peace-keeping*), serta mempromosikan demokrasi dengan memonitor dan mengawasi pemilu, dan memperkuat praktek-praktek dan institusi-institusi yang demokratis.
- b. Memastikan stabilitas ekonomi dunia melalui reformasi kebijakan dan langkah-langkah untuk menghindari masalah besar di bidang keuangan dan perdagangan internasional, misalnya dengan

- menyediakan dana untuk meredakan krisis hutang dan pengembalian arus keuangan untuk menstabilkan harga komoditas.
- c. Mempertahankan stabilitas sosial untuk mencegah migrasi internasional, seperti program untuk mengurangi pertumbuhan penduduk, memerangi kemiskinan, mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM), memperbaiki kondisi atau permasalahan perempuan, dan lain-lain.
 - d. Membantu negara berkembang untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam perekonomian dunia, misalnya dengan peningkatan kapasitas dalam pengetahuan, inovasi, dan produksi, serta dalam perjanjian internasional untuk membuat mereka dapat terlibat secara adil, stabil, dan efektif.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan data-data yang didapat berupa tulisan ilmiah dan pemaparan pelaporan serta tindakan yang tergambar di tulisan-tulisan tersebut.³⁴ Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif analisis dimana analisis dilakukan dengan mengkaji fenomena yang diangkat menjadi lebih rinci.³⁵ Metode deskriptif merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data ataupun sampel yang sudah dikumpulkan dalam sebuah penelitian, dimana hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan

³⁴ Iskandar, "Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)". (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 186.

³⁵ *Ibid*, 186.

dianalisis kesimpulannya dalam bentuk umum.³⁶ Dalam hal ini, metode deskriptif analisis diambil dikarenakan bertujuan untuk memperoleh pemaparan yang objektif mengenai motivasi Rusia yang mempersenjatai Filipina dalam kebijakan *War on Drugs*.

1.8.2 Batasan Masalah

Melihat upaya yang dilakukan Rusia dalam mendukung program *War on Drugs* yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina serta pengabaian Rusia terhadap dunia yang mengancam isu pelanggaran HAM tersebut, batasan waktu yang digunakan untuk melihat motivasi Rusia dalam mempersenjatai Filipina pada kebijakan *War on Drugs* adalah dari tahun 2016 hingga tahun 2017 yang merupakan masa kepemimpinan Rodrigo Duterte sebagai Presiden Filipina. Alasan mengapa tahun 2018 tidak dimasukkan ke dalam batasan waktu penelitian adalah dikarenakan keterbatasan data tahun 2018 yang masih sulit untuk diakses serta keakuratan data di tahun tersebut yang masih terbilang prematur untuk dijadikan sebagai sebuah sumber atau data dalam penelitian ini. Penelitian ini tidak membatasi jikalau pada proses analisis data ditemukan bantuan-bantuan lain yang bukan untuk implementasi kebijakan *War on Drugs*, karena penulis meyakini keberadaan *War on Drugs* hanya sebagai *tipping point* bagi Rusia untuk dapat memperluas kerja sama dengan Filipina.

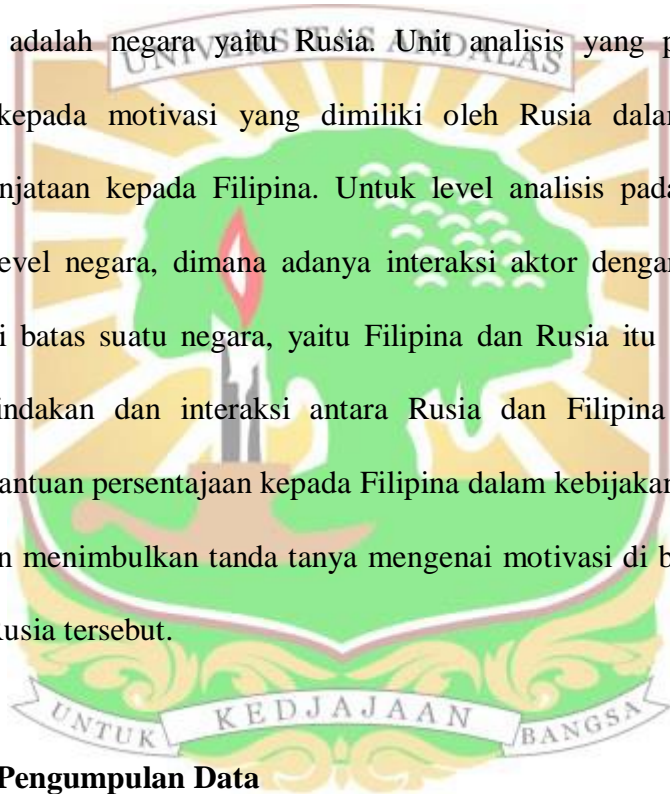
Penulisan ini juga menambahkan penjabaran sederhana mengenai bagaimana hubungan antara kedua negara ini sebelum dan sesudah mangkirnya Amerika Serikat dari Filipina. Hal ini dipertimbangkan agar menghindari

³⁶ Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2009), 38

ketidaklengkapan penelitian ini, serta membantu agar penelitian ini tidak menjadi sebuah topik yang mengambang.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan objek yang perilakunya akan dianalisis. Sedangkan tingkat atau level analisis merupakan elemen yang menjadi landasan terhadap keberlakuan pengetahuan yang digunakan.³⁷ Unit analisis dalam penelitian ini adalah negara yaitu Rusia. Unit analisis yang penulis maksud menekankan kepada motivasi yang dimiliki oleh Rusia dalam memberikan bantuan persenjataan kepada Filipina. Untuk level analisis pada penelitian ini berada pada level negara, dimana adanya interaksi aktor dengan aktor lainnya yang melewati batas suatu negara, yaitu Filipina dan Rusia itu sendiri. Hal ini dilihat dari tindakan dan interaksi antara Rusia dan Filipina dimana Rusia memberikan bantuan persenjataan kepada Filipina dalam kebijakan *War on Drugs* yang kemudian menimbulkan tanda tanya mengenai motivasi di balik sikap yang diambil oleh Rusia tersebut.



1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang didasarkan pada *literature research*, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang telah ada dalam pembahasan mengenai hubungan Rusia dan Filipina, serta kebijakan *War on Drugs* sebagai sebuah aturan dan juga peran yang dimainkannya hingga dianggap sebagai awal mula terbentuknya hubungan Rusia-

³⁷ Jon C. Pavehouse dan Joshua S. Goldsteinn. "International Relations", (London: Pearson Education, 2014), 18.

Filipina. Data-data lain yang digunakan adalah melihat motivasi negara yang dicoba untuk disimpulkan dari penjabaran mengenai apa saja yang sudah terjadi selama kebijakan *War on Drugs* diberlakukan serta data pendukung yang menjelaskan bagaimana hubungan Rusia-Filipina di tatanan domestik ataupun internasional yang kemudian menjadikannya sebuah isu yang membutuhkan analisis lebih lanjut.

Penulis mengumpulkan data yang memiliki kata kunci (*keywords*) seperti *War on Drugs*, Rusia, Filipina, Motivasi, dan Bantuan Luar Negeri. Data yang penulis kumpulkan berasal dari jurnal, buku, pidato kepresidenan, dan laporan pemerintah atau institusi dari 10 terakhir untuk menjamin bahwa informasi yang didapatkan bersifat baru dan dapat menunjang topik penelitian penulis. Penulis mengumpulkan data-data tersebut dengan mengumpulkan buku-buku serta berkas-berkas yang berasal dari perpustakaan dan internet, serta dengan mengunjungi laman resmi pemerintahan Rusia dan Filipina demi menjaga keabsahan data.

1.8.5 Analisis dan Pengolahan Data

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.³⁸ Tahapan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap ini peneliti mengeleminasi atau mereduksi data yang telah dikumpulkan. Tahapan ini dimulai dengan mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dengan

³⁸ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, "Qualitative Data Analysis" (London: Sage Publications, 1994), 18.

beberapa kategori. Pengelompokan tersebut berdasarkan kategori *War on Drugs*, bantuan Rusia kepada Filipina, hubungan Rusia-Filipina pasca pemberian bantuan, dan keuntungan yang didapatkan oleh Rusia. Setelah data dikelompokkan, penulis membaca dokumen-dokumen yang hanya berkaitan dengan topik yang penulis bahas pada penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada proses pengolahan data yang berbentuk artikel jurnal, laporan, serta buku, penulis hanya membaca halaman-halaman yang sesuai dengan *keyword* atau penjelasan yang sedang penulis teliti.

2. Penyajian data (*data display*), setelah membaca dengan seksama, penulis mengambil intisari dari bacaan tersebut dengan menggunakan kalimat penulis tanpa menghilangkan esensi atau ide utama dari data yang telah penulis baca sebelumnya. Pada proses ini juga penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan berangkat dari hubungan Filipina-Rusia yang belum pernah terjalin sebelumnya pada saat Filipina masih beraliansi dengan Amerika Serikat. Setelah itu, proses analisis berangkat pada aktivitas Rusia yang mempersenjatai Filipina dalam kebijakan *War on Drugs* untuk melihat motivasi dan kepentingan yang ingin dicapai oleh Rusia melalui kerjasama tersebut dengan mengaplikasikan kerangka konseptual yaitu konsep bantuan luar negeri dan konsep motivasi bantuan luar negeri.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Setelah penerapan konsep dilakukan kemudian ditarik kesimpulan dan verifikasi keterkaitan konsep dengan hasil yang didapatkan

1.9 Sistematika Penulisan

Hasil dari penulisan ini dituangkan dalam 5 bab. Untuk pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan dari penelitian ini.

BAB II

Filipina di Bawah Kepemimpinan Rodrigo Duterte

Pada bab ini terdapat 2 poin yang dibahas oleh penulis. Pertama, kebijakan luar negeri Filipina, dimulai dari landasan umum kebijakan luar negeri Filipina, dan kemudian menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Filipina pada masa sebelum kepemimpinan Duterte dan saat kepemimpinan Rodrigo Duterte itu sendiri. Pada poin yang kedua, penulis menjabarkan tentang bagaimana posisi Filipina di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dirasa perlu oleh penulis karena dengan adanya keunggulan yang dimiliki oleh Filipina di kawasan Asia Tenggara dapat menggali lebih dalam tentang alasan dan peluang yang dimiliki oleh Rusia

dalam memulai sebuah hubungan luar negeri yang akrab dengan Filipina, dan juga melalui poin kedua ini, diharapkan mampu membantu penulis untuk menjawab keterkaitan antara Filipina dengan kebijakan “Pivot to Asia” yang sedang digadang-gadangkan oleh Rusia.

BAB III

Bantuan yang Diberikan Rusia Kepada Filipina Terkait Pelaksanaan Kebijakan *War on Drugs*

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang hubungan kerjasama yang dijalin antara Rusia-Filipina dimulai dari penjelasan mengenai kebijakan “Pivot to Asia” yang menjadi landasan dari hubungan kedua negara tersebut. Setelah itu penulis menjelaskan mengenai bantuan yang diberikan oleh Rusia kepada Filipina baik itu terkait kebijakan *War on Drugs*, maupun bantuan-bantuan yang diberikan pasca terbentuknya kerja sama setelah bantuan *War on Drugs*. Penjelasan pada bab ketiga ini nantinya berkaitan dengan kerangka konsep pertama yang penulis cantumkan pada bagian bab satu mengenai bantuan luar negeri.

BAB IV

Motivasi Pemberian Bantuan Oleh Rusia Kepada Filipina Terkait Kebijakan *War on Drugs*

Bab ini berisikan deskripsi motivasi pemberian bantuan oleh Rusia kepada Filipina dalam kebijakan *War on Drugs*. Pada bagian ini menjelaskan analisis tentang motivasi yang dimiliki oleh Rusia dari tindakannya yang memberikan bantuan persenjataan kepada Filipina dalam kebijakan *War on Drugs*. Bab ini memiliki sub-bab sebagai berikut: Motivasi Solidaritas dan

Keagamaan, Motivasi Kepentingan Nasional, dan Motivasi Menjaga Stabilitas Internasional.

BAB V

Kesimpulan

Bab ini berisi kesimpulan penulis terkait penelitian penulis serta saran dari penulis terkait dengan motivasi bantuan persenjataan Rusia kepada Filipina dalam kebijakan *War on Drugs*.

